

**DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR  
(Studi Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi  
Perkawinan di Peradilan Agama Se Ex Karesidenan Surakarta)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Srata II pada  
Jurusan Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh:**

**M. Muslih  
NIM. R 100160004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
SEKOLAH PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA  
2018**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**  
**(Studi Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi**  
**Perkawinan di Peradilan Agama Se Ex Karesidenan Surakarta)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

Oleh:

**M. Muslih**  
**NIM. R 100160004**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing I



**Prof. Dr. Harun, SH. M.Hum.**

Dosen pembimbing II



**Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.**

HALAMAN PENGESAHAN

**DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**  
**(Studi Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi**  
**Perkawinan di Peradilan Agama Se Ex Karesidenan Surakarta)**


Oleh:

M. Muslih  
NIM. R 100160004

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 28 Februari 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Harun, S.H., M.Hum.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin., S.H., M.Kn., Ph.D.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)

(  )

(  )

(  )



Direktur,

  
Prof. Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd

## PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan bahwa naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat kata atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dan kesalahan dalam pernyataan saya diatas maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 28 Februari 2018

Yang Menyatakan



M. MUSLIH

**DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR**  
**(Studi Pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi Perkawinan di**  
**Peradilan Agama Se Ex Karesidenan Surakarta)**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan mengenai latar belakang permohonan Dispensasi Perkawinan di Ex Karesidenan Surakarta, formulasi pengaturan Dispensasi Perkawinan dibawah umur dan analisis pertimbangan Hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur, tujuan mana berguna untuk mengetahui dan memahami pentingnya dispensasi perkawinan dibawah umur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan hukum normatif dengan dilengkapi dengan data-data penetapan Hakim se Ex Karesidenan Surakarta khusus mengenai dispensasi perkawinan, sehingga penelitiannya dengan mendasarkan kajian pustaka utamanya peraturan perundang-undangan yang kemudian dipadukan dengan menggunakan survei lapangan secara lengkap dan akurat karena melalui persidangan formal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan Hakim dalam penetapan dispensasi diklasifikasikan menjadi dua, yaitu pertimbangan hukum dan pertimbangan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hukum disini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan, sedangkan pertimbangan keadilan masyarakat karena seringkali perkawinan dinilai sebagai solusi alternatif bagi penyelesaian masalah sosial. Pertimbangan Hakim yang lainnya adalah agar yang akan menikahi adalah ayah biologis anak yang dikandung.

Kata Kunci : Dasar pertimbangan hakim dan Dispensasi perkawinan dibawah umur.

*Abstract*

*This study aims to analyze the issue concerning the background of the marriage dispensation application in Ex Karesidenan Surakarta, the formulation of the Regulation of Underage Marriage Dispensation and Judge's consideration analysis in providing marriage dispensation withage, which purposeisuseful to know and understand the importance of underage marriage dispensation. This research uses research method with normative law approach with supplementary data of Judge of Ex Surakarta Residency specially about marriage dispensation, so that its research based on literature review primarily legislation which then combined with using serveifield as complete and accurate because through formal hearings. The results of this study indicate that the judges' considerations in the dispensation determination are classified into two, namely legal considerations and fairness considerations that live in the community. The legal consideration here means that when the judge imputes his determination must be in accordance with the arguments and legal evidencepresented, while the consideration of community just ice because often marriage is considered as an alternative solution for the settlement of social problems. Another judge's consideration is that to marry is the biological father of the child conceived.*

*Keywords: Basis of Judge Consideration and Underage Marriage Dispensation.*

## 1. Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedemikian luhurnya anggapan tentang suatu perkawinan menyebabkan terlibatnya seluruh kerabat dan bahkan seluruh anggota masyarakat itu yang memberi petunjuk dan nasehat serta pengharapan agar dapat dilihat dalam kenyataan bahwa dalam kehidupan masyarakat kita, bahwa tidak ada suatu upacara yang paling diagungkan selain upacara perkawinan, sehingga dijadikan suatu peristiwa yang suci lagi sakral.

Di Indonesia sendiri untuk ketentuan batas umur usia perkawinan relatif rendah dan sering tidak dipatuhi sepenuhnya dalam pelaksanaannya. Untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah telah diatur didalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 6 ayat (2) yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”<sup>1</sup> Undang-undang tentang Perkawinan tersebut merupakan salah satu wujud aturan tata tertib pernikahan yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat, di samping aturan-aturan tata tertib pernikahan yang lain yaitu Hukum Adat dan Hukum Agama.

Suatu akad perkawinan menurut Hukum Islam adalah akad yang dilaksanakan dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang lengkap, sesuai dengan ketentuan agama maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi pada kenyataan ada perkawinan-perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan tersebut karena calon suami dan atau calon isteri masih kurang umur, yaitu bagi calon suami batas minimal 19 tahun sedangkan bagi calon isteri 16 tahun. Dengan demikian ada fenomena bahwa di wilayah Pengadilan Agama se Ex Karesidenan Surakarta jumlah perkara dispensasi kawin setiap tahunnya cenderung meningkat. Padahal wilayah tersebut yang semakin bertambah tahun mestinya semakin dewasa dan matang segala-galanya, termasuk bidang pendidikan, ekonomi, budaya, politik dan sebagainya, sehingga kesadaran

---

<sup>1</sup> Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, Jakarta, 1985 hal. 119

hukumpun semakin membaik dengan demikian otomatis permohonan Dispensasi Kawin semakin berkurang dan menurun.

Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, sehingga konsekuensi bagi setiap perbuatan hukum yang sah adalah menimbulkan akibat hukum, berupa hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak suami istri atau juga pihak lain dengan siapa salah satu pihak atau kedua-duanya atau suami istri mengadakan hubungan.

Dengan demikian perkawinan itu diperlukan kematangan secara menyeluruh yang mana kesemuanya tercakup dalam terpenuhinya umur calon suami dan isteri sehingga tergolong sudah dewasa.

Adanya fenomena perkara dispensasi perkawinan dibawah umur di wilayah Pengadilan Agama se Ex Karesidenan Surakarta setiap tahunnya cenderung meningkat, maka jangan sampai berhenti pada fenomena saja tetapi perlu sekali dibuktikan akan kebenarannya, sehingga dalam hal ini penulis memandang perlu dan ingin sekali membuktikan dengan melakukan usaha penelitian semaksimal mungkin demi mencari kebenaran fenomena tersebut dengan cara mengumpulkan data maupun fakta-fakta yang ada di Pengadilan Agama sewilayah ex Karesidenan Surakarta.

Masalah yang akan di kaji yaitu pertama, bagaimana latar belakang peningkatan permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama se Ex Karesidenan Surakarta ? kedua bagaimana formulasi pengaturan Dispensasi Perkawinan dibawah umur ? dan ketiga bagaimana analisis pertimbangan Hakim dalam memberikan Dispensasi Perkawinan dibawah umur ?

## **2. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian dari sudut sifatnya yang bersifat Penelitian Deskriptif, yaitu mempelajari masalah dalam masyarakat, tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat. Jenis kajian dalam penelitian ini bersifat Deskriptif, Penelitian Deskriptif ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat

terhadap suatu obyek tertentu.<sup>2</sup> Didalam hal ini metode penelitian yang penulis gunakan dari sudut tujuan penelitian hukum, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris.

Berkaitan dengan data dan sumber data, maka penulis perlu meninjau metode penelitian kuantitatif maupun metode penelitian kualitatif, maka dalam kesempatan ini penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu metode yang membutuhkan populasi maupun sampel.<sup>3</sup> Namun demikian penulis juga perlu menyampaikan penjelasan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan Pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Data adalah merupakan bahan yang akan dianalisis yaitu berupa penetapan, pendapat para Hakim, sedangkan sumber datanya dari Pengadilan Agama se wilayah ex Karesidenan Surakarta.

Dalam hal ini penulis berusaha mewawancarai minimal dua orang Hakim setiap unit Peradilan sehingga sampel responden Hakim se ex Karesidenan Surakarta oleh karena terdapat 7(tujuh) Peradilan Agama, yaitu Pengadilan Agama Surakarta, Pengadilan Agama Boyolali, Pengadilan Agama Klaten, Pengadilan Agama Sukoharjo, Pengadilan Agama Karanganyar, Pengadilan Agama Sragen, dan Pengadilan Agama Wonogiri maka yang penulis wawancarai adalah sejumlah 14 (empat belas) Hakim. Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data secara kuantitatif. Metode kuantitatif dilakukan dengan menganalisis data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan dan literature lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap Dispensasi Perkawinan, yang kemudian akan dihubungkan dengan data-data yang diperoleh Penulis dari studi lapangan yang berupa statistik hasil observasi dan wawancara dengan responden atau nara sumber yang bersangkutan maupun dokumen penetapan Hakim untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta menguraikannya dengan kalimat yang teratur sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan.

---

<sup>2</sup> Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal 35.

<sup>3</sup> Ibid. Hal 98.



### 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

#### 3.1.Latar belakang peningkatan permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama se Ex Karesidenan Surakarta

Data permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur Se Ex Karesidenan Surakarta ini merupakan gambaran nyata tentang keadaan perkara tersebut selama kurun waktu 5 tahun terakhir meskipun diantara Pengadilan Agama yang satu dengan yang lain berbeda peningkatannya, namun ternyata Pengadilan Agama Boyolali, Pengadilan Agama Sukoharjo, Pengadilan Agama Karanganyar, dan Pengadilan Agama Sragen sehingga sejumlah 4 Pengadilan Agama diantara 7 Pengadilan Agama dalam kondisi jumlah perkaranya terus meningkat dengan demikian bisa dikatakan bahwa permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur Se Ex Karesidenan Surakarta terus meningkat. Disinilah sudah semestinya kita memikirkan solusinya bagaimana kita bisa menekan dan mengurangi lonjakan tersebut.

#### Data Permohonan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur Se Ex Karesidenan Surakarta

Tabel 1

No.	Pengadilan Agama	Tahun		
		2012	2014	2016
1.	Surakarta	30	47	38
2.	Boyolali	36	66	92
3.	Klaten	101	147	95
4.	Sukoharjo	36	56	58
5.	Karanganyar	64	74	86
6.	Sragen	83	95	96
7.	Wonogiri	70	75	63

### Populasi, Sample, dan Status Para Pemohon

Tabel 2

No.	PA Kab/Kota	Populasi Per Sep- 2017	Sample	Status/Pekerjaan Orang Tua
1.	Surakarta	25	2	I. Identitas pemohon alamat tidak jelas sehingga perkara tidak diterima II. Status orang tua cerai anak pemohon sebagai calon suami
2.	Boyolali	65	2	I. Buruh pabrik II. Petani
3.	Klaten	74	2	I. Buruh II. Buruh
4.	Sukoharjo	40	2	I. Buruh II. Swasta
5.	Karanganyar	60	2	I. Petani II. Petani
6.	Sragen	59	2	I. Swasta Bercerai II. Buruh
7.	Wonogiri	52	2	I. Dagang II. Petani

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karesidenan Surakarta dari aspek status ekonomi ternyata diantara petani, buruh, swasta, dan pedagang yang paling dominan adalah pekerja buruh dimana status sosial yang demikian perlu dikaji seberapa jauh pengaruh status sosial ekonomi tersebut terhadap peningkatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Ex Karesidenan Surakarta. Namun demikian gambaran secara umum status sosial yang ada yaitu yang paling rendah adalah buruh, dengan demikian status ekonomi yang lemah/rendah mempengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.

### Sample Umur dan Kondisi Calon Istri

Tabel 3

No.	PA Kab./Kota	Umur Calon Suami/Istri	Kondisi
1.	Surakarta	I. – II. Calon suami 17 tahun, 11 bulan	- Calon istri hamil
2.	Boyolali	I. Calon suami 17 tahun II. Calon istri 15 tahun, 9 bulan	Calon istri hamil 4 bulan -
3.	Klaten	I. Calon istri 15 tahun, 5 bulan II. Calon suami 17 tahun, 7 bulan	Calon istri hamil 2 bulan Calon istri hamil 2 bulan
4.	Sukoharjo	I. Calon suami 18 tahun, 9 bulan II. Calon suami 17 tahun, 8 bulan	Calon istri hamil 4 bulan Calon istri hamil 3 bulan
5.	Karanganyar	I. Calon suami 18 tahun, 3 bulan II. Calon suami 17 tahun, 2 bulan	Calon istri hamil 2 bulan Calon istri hamil 3 bulan
6.	Sragen	I. Calon istri 15 tahun, Calon suami 18 tahun II. Calon suami 18 tahun, Calon istri 15 tahun	Khawatir berzina  Calon istri hamil 6 bulan

<b>7.</b>	<b>Wonogiri</b>	I. Calon istri 15 tahun, Calon suami 17 tahun, 7 bulan II. Calon suami 18 tahun, 7 bulan	Sudah lama kumpul kebo  Calon istri hamil 7 bulan
-----------	-----------------	--	---

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karesidenan Surakarta dari aspek kondisi calon istri ternyata sampel dari populasi yang ada 90% atau setidaknya-tidaknya paling banyak adalah dikarenakan hamil, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran calon suami istri terhadap Hukum Islam maupun Hukum Positif sangat rendah sekali, sehingga dengan rendahnya kesadaran terhadap hukum ini mempengaruhi semakin meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan, sehingga perlu adanya peningkatan semacam penyuluhan terhadap kesadaran hukum khususnya tentang peraturan perundang-undangan perkawinan.

Adapun faktor pendorong perkawinan di bawah umur sebagai berikut :

#### 1) Faktor Pendorong Permohonan Dispensasi Perkawinan di bawah Umur

Tabel 4

<b>No.</b>	<b>PA Kab/Kota</b>	<b>Penyebab</b>	<b>Akibat</b>
<b>1.</b>	<b>Surakarta</b>	I. - II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat	-  Calon istri hamil
<b>2.</b>	<b>Boyolali</b>	I. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat 1,5 tahun II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat	Calon istri hamil 4 bulan  -

<b>3.</b>	<b>Klaten</b>	I. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat 5 bulan II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat 2 tahun 2 bulan	Calon istri hamil 2 bulan  Calon istri hamil 2 bulan
<b>4.</b>	<b>Sukoharjo</b>	I. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan sudah erat II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan sudah erat	Calon istri hamil 4 bulan  Calon istri hamil 3 bulan
<b>5.</b>	<b>Karanganyar</b>	I. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Pacaran 6 bulan II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Pacaran 6 bulan	Calon istri hamil 2 bulan  Calon istri hamil 3 bulan
<b>6.</b>	<b>Sragen</b>	I. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Sudah bertunangan 2 bulan II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat 1 bulan	Khawatir berzina  Calon istri hamil 6 bulan
<b>7.</b>	<b>Wonogiri</b>	I. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat 5 bulan II. a. Kurang umur b. Ditolak KUA c. Berhubungan terlalu dekat 1 tahun	Sudah lama kumpul kebo  Calon istri hamil 7 bulan

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karisidenan Surakarta tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong mengapa mengajukan permohonan perkawinan dibawah umur. Dari fakta yang ada yang dapat dipastikan adalah adanya kurang umur dan ditolak oleh Kantor Urusan

Agama. Kemudian faktor pendorong yang lain adalah adanya hubungan lawan jenis terlalu dekat juga istilah yang lain berhubungan sudah erat maupun pacaran, dalam hal ini bisa dikatakan masih terlalu rendah terhadap kesadaran hukum baik Hukum Positif maupun Hukum Islam utamanya terlalu bebasnya pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua maupun lingkungan yang ada, sehingga para calon melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan timbulnya kehamilan.

## 2) Faktor Pendidikan dan Pekerjaan Calon Suami dan Calon Istri

Tabel 5

No.	PA Kab/Kota	Para Calon Suami/Istri	Pendidikan	Pekerjaan
1.	Surakarta	I. - II. a. Calon suami b. Calon istri	- SLTA SD	- Buruh -
2.	Boyolali	I. a. Calon suami b. Calon istri II. a. Calon istri b. Calon suami	SMP SMP SMP SMP	Buruh - - Dekorasi
3.	Klaten	I. a. Calon istri b. Calon suami II. a. Calon suami b. Calon istri	- - - -	Warung makan Sopir Buruh Buruh
4.	Sukoharjo	I. a. Calon suami b. Calon istri II. a. Calon suami b. Calon istri	- - SLTP SD	Swasta - Tukang parkir -

5.	Karanganyar	I. a. Calon suami b. Calon istri II. a. Calon suami b. Calon istri	- - SMP SMP	Sopir Petani Buruh bangunan -
6.	Sragen	I. a. Calon istri b. Calon suami II. a. Calon suami b. Calon istri	SD SMP - -	Swasta Swasta Belum bekerja -
7.	Wonogiri	I. a. Calon istri b. Calon suami II. a. Calon suami b. Calon istri	- - - -	- buruh - -

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karisidenan Surakarta dari faktor pendidikan dan pekerjaan calon suami dan calon istri. Dalam hal ini dari fakta yang ada dari sekian banyak sampel ternyata dari calon suami maupun istri yang berpendidikan SLTA hanya 1 dan selainnya adalah SLTP kebawah, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan kondisi mereka berpendidikan rendah. Dari bekal pendidikan rendah inilah ternyata mayoritas pekerjaan mereka adalah sebagai buruh, sehingga dalam hal inilah perlu adanya peningkatan status sosial mereka utamanya tentang pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan.

### 3.2. Bagaimana formulasi pengaturan Dispensasi Perkawinan dibawah umur

#### 1) Peraturan Perundang-undangan terkait Dispensasi Perkawinan

- I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) tentang perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa penyimpangan terhadap ketentuan ayat (1) mengenai batas usia minimal untuk menikah, dapat meminta dispensasi kepada

Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan.<sup>4</sup>

- II. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) Menyatakan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni pihak pria sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan pihak wanita sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.<sup>5</sup>

Peranan hakim sebagai aparat kekuasaan kehakiman pasca Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pada prinsipnya tidak lain daripada melaksanakan fungsi Peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dalam menjalankan fungsi peradilan ini, para hakim Peradilan Agama harus menyadari sepenuhnya bahwa tugas pokok hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam setiap putusan yang hendak dijatuhkan oleh hakim dalam mengakhiri dan menyelesaikan suatu perkara, perlu diperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Ketiga hal ini harus mendapat perhatian yang seimbang secara profesional. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung asas tersebut diatas. Jangan sampai ada putusan hakim yang justru menimbulkan keresahan dan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.<sup>6</sup>

Putusan Hakim harus memberikan pertimbangan hukum terhadap perkara yang ditangani dan disidangkannya. Dalam pertimbangan hukum ini Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan dispensasi perkawinan serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang disampaikan oleh pemohon. Dari pertimbangan hukum tersebut Hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya permohonan itu. Disinilah argumentasi Hakim dipertaruhkan dalam mengonstatir segala peristiwa yang terjadi selama persidangan berlangsung.

---

<sup>4</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. cet II. (Jakarta:PT.RinekaCipta.1994), hlm.209

<sup>5</sup> Wahyu Widiana, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000), hlm. 19

<sup>6</sup> Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media. Jakarta, 2005. Hal. 291



Setelah hal-hal tersebut diatas dipertimbangkan satu persatu secara kronologis dengan diikuti dasar hukumnya yaitu dengan mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang disusun menurut urutan derajatnya, misalnya undang-undang didahulukan dari peraturan pemerintah dan sebagainya kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara` yang menjadi sandaran pertimbangannya. Sebaiknya diutamakan dalil yang bersumber dari Al-Qur`an kemudian Al-Hadist, baru pendapat para Ulama/Fuqaha`. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan.

### **3.3. Bagaimana Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur**

#### **1) Hasil Kajian Yang Akurat Terhadap Penetapan Hakim Se Ex Karesidenan Surakarta**

Data permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur Se Ex Karesidenan Surakarta ini merupakan gambaran nyata tentang keadaan perkara tersebut selama kurun waktu 5 tahun terakhir meskipun diantara Pengadilan Agama yang satu dengan yang lain berbeda peningkatannya, namun ternyata Pengadilan Agama Boyolali, Pengadilan Agama Sukoharjo, Pengadilan Agama Karanganyar, dan Pengadilan Agama Sragen sehingga sejumlah 4 Pengadilan Agama diantara 7 pengadilan agama dalam kondisi jumlah perkaranya terus meningkat dengan demikian bisa dikatakan bahwa permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur Se Ex Karesidenan Surakarta terus meningkat. Disinilah sudah semestinya kita memikirkan solusinya bagaimana kita bisa menekan dan mengurangi lonjakan tersebut.

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karesidenan Surakarta dari aspek status ekonomi ternyata diantara petani, buruh, swasta, dan pedagang yang paling dominan adalah pekerja buruh dimana status sosial yang demikian perlu dikaji seberapa jauh pengaruh status sosial ekonomi tersebut terhadap peningkatan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Ex Karesidenan Surakarta.

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karesidenan Surakarta dari aspek kondisi calon istri ternyata sampel dari populasi yang ada

90% atau setidaknya-tidaknya paling banyak adalah dikarenakan hamil, sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran calon suami istri terhadap Hukum Islam maupun Hukum Positif sangat rendah sekali, sehingga perlu adanya peningkatan semacam penyuluhan terhadap kesadaran hukum khususnya tentang peraturan perundang-undangan perkawinan.

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karisidenan Surakarta tidak terlepas dari adanya faktor-faktor pendorong mengapa mengajukan permohonan perkawinan dibawah umur. Dari fakta yang ada yang dapat dipastikan adalah adanya kurang umur dan ditolak oleh kantor urusan agama. Kemudian faktor pendorong yang lain adalah adanya hubungan lawan jenis terlalu dekat juga istilah yang lain berhubungan sudah erat maupun pacaran, dalam hal ini bisa dikatakan masih terlalu rendah terhadap kesadaran hukum baik Hukum Positif maupun Hukum Islam utamanya terlalu bebasnya pergaulan dan kurangnya pengawasan dari orang tua maupun lingkungan yang ada, sehingga para calon melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan timbulnya kehamilan.

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karisidenan Surakarta dari faktor pendidikan dan pekerjaan calon suami dan calon istri. Dalam hal ini dari fakta yang ada dari sekian banyak sampel ternyata dari calon suami maupun istri yang berpendidikan SLTA hanya 1 dan selainnya adalah SLTP kebawah, sehingga dalam hal ini dapat dikatakan kondisi mereka berpendidikan rendah. Dari bekal pendidikan rendah inilah ternyata mayoritas pekerjaan mereka adalah sebagai buruh, sehingga dalam hal inilah perlu adanya peningkatan status sosial mereka utamanya tentang pendidikan masyarakat perlu ditingkatkan.

Responden permohonan perkawinan dibawah umur di Ex Karisidenan Surakarta yang berkaitan dengan realisasi responden para hakim dalam pertimbangannya memutuskan permohonan dispensasi dapat dilihat terutama dalam putusannya. Dalam hal ini penulis cenderung melihat putusan para hakim dalam putusannya secara formal yaitu dalam persidangan dimana putusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan senilai dengan akte otentik. Didalam faktanya para hakim didalam mempertimbangkan perkara tersebut secara teliti, cermat, dan

menyeluruh yaitu sejak dari identitas sampai kepada pokok perkara yaitu baik yang menyangkut kompetensi relatif maupun kompetensi absolut.

Dalam hal ini utamanya yang berkaitan dengan pokok perkara khususnya dispensasi perkawinan para hakim dalam mempertimbangkan dapat diambil garis besarnya ada 5 poin:

1. Permohonan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) UU No.1 th 1974 jo pasal 15 ayat (1) KHI.
2. Para calon telah berhubungan cukup lama dan sangat akrab.
3. Calon istri telah hamil.
4. Pemohon timbul kekhawatiran kedua calon berzina terus-menerus.
5. Calon suami mampu dan siap melaksanakan kewajiban diantaranya memberi nafkah.

Meskipun dalam hal ini diantara para hakim ada yang pertimbangannya tidak kronologis namun endingnya berkisar pada 5 poin tersebut diatas dan tidak terlepas dari hukum formil maupun hukum materiilnya.

## **2) Hasil Kajian Pertimbangan Hakim Terhadap Dispensasi Perkawinan Dibawah Umur**

Pertimbangan dan dasar hakim Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang biasanya dimulai dengan kata “menimbang” dan dari dasar memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”.<sup>7</sup>

Pada alasan memutus maka apa yang diutarakan dalam bagian “duduk perkaranya” terdahulu, yaitu keterangan pihak-pihak berikut dalil-dalilnya, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang semua secara seksama satu persatu, tidak boleh ada yang luput dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pertimbangan terakhir adalah pihak yang mana yang akan dinyatakan sebagai pihak yang akan dibebankan untuk memikul biaya perkara.

Pada dasar memutus, dasar hukumnya ada dua, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum syara`. Peraturan perundang-undangan negara

---

<sup>7</sup> A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal 206

disusun menurut urutan derajatnya, misalnya undang-undang didahulukan peraturan pemerintah. Dasar hukum syara` usahakan mencarinya dari Al-Qur`an, Al-Hadist, Qaul Fuqaha`.<sup>8</sup> Alasan memutus dan dasar memutus yang wajib menunjuk kepada peraturan perundang-undangan negara atau sumber hukum lainnya dimaksudkan (c/q. dalil syar`i bagi Peradilan Agama) memang diperintahkan oleh Pasal 23 ayat (1) UU Nomor. 14 tahun 1970.<sup>9</sup>

#### **4. Penutup**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka faktor penyebab meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur diantaranya:

- a. Dari aspek status ekonomi yang lemah/rendah mempengaruhi meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur.
- b. Dari aspek kondisi calon istri hamil dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran calon suami istri terhadap Hukum Islam maupun Hukum Positif sangat rendah.
- c. Dari aspek adanya hubungan lawan jenis terlalu dekat, bebasnya pergaulan dan kurangnya pengawasan orang tua maupun lingkungan, yang mengakibatkan timbulnya kehamilan.
- d. Dari aspek pendidikan rendah berakibat mayoritas pekerjaan mereka adalah sebagai buruh, dari sini pulalah pengetahuan dan kesadaran tentang hukum menjadi sangat rendah.

Beberapa faktor inilah yang menjadi penyebab meningkatnya permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama se Ex Karesidenan Surakarta yang mana diantara faktor yang satu saling mempengaruhi dengan faktor yang lain.

1. Para Hakim se Ex Karesidenan Surakarta sepakat bahwa adanya aturan dispensasi nikah, hanya sekedar pengecualian dalam kasus-kasus tertentu seperti hamil diluar nikah dan juga kekhawatiran orang tua terhadap calon

---

<sup>8</sup> Ibid. Hal. 207

<sup>9</sup> Ibid. Hal. 208

suami istri agar tidak terjerumus perzinaan. Dikabulkannya dispensasi ini tidak bermaksud untuk menentang aturan usia nikah didalam undang-undang atau bahkan melegalkan pernikahan dini. Dispensasi nikah karena hamil yang dikabulkan bertujuan untuk melindungi anak yang sedang hamil dan anak yang ada didalam kandungan serta meminimalisir terjadinya keburukan-keburukan yang lebih besar yang mungkin saja terjadi seperti aborsi, gangguan psikologis bahkan sampai bunuh diri.

2. Pertimbangan Hakim dalam pemberian Dispensasi Perkawinan di bawah umur selalu mengacu kepada hukum formil karena hukum perdata yang ditekankan maka sudah selayaknya mengedepankan kebenaran hukum formil, meskipun tidak boleh meninggalkan hukum materiilnya. Adapun ide-ide yang ditawarkan oleh para hakim untuk menekan tingginya dispensasi nikah karena hamil, yaitu:
  - a. Peran dan kontrol orang tua terhadap kehidupan sehari-hari anak,
  - b. Pemantapan keimanan anak sejak dini,
  - c. Peranan pendidikan sekolah,
  - d. Kepedulian lingkungan sekitar,
  - e. Peningkatan kepedulian pemerintah terhadap moral para remaja,
  - f. Peningkatan penyuluhan pernikahan dini dan segala resikonya.

Menurut para hakim tersebut, semua pihak-pihak diatas harus saling mendukung satu sama lain karena faktor-faktor penyebab tersebut saling mempengaruhi, sehingga hasil yang diinginkan dapat terwujud dengan maksimal.

#### **4.2 Saran-saran**

Berdasarkan hasil pembahasan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran dan kontribusi sebagai berikut:

1. Para hakim pengadilan agama, khususnya dalam menangani kasus permohonan dispensasi nikah, sangat dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.
2. Para orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah, diharapkan untuk saling mendukung dalam rangka membimbing dan mengarahkan para penerus bangsa agar tidak terjerumus ke jalan yang merusak moral bangsa.

3. Untuk pihak Legislatif, agar meninjau kembali aturan undang-undang berkaitan dengan batasan dikabulkan atau tidaknya permohonan dispensasi Perkawinan di bawah umur karena bisa dikatakan semua permohonan nyaris terkesan dikabulkan karena tidak menemukan penetapan Hakim yang tidak mengabulkan sehingga dimata masyarakatpun tidak ada rasa timbul jera terhadap perbuatan yang dilarang yaitu berzina. Memang kita harus melindungi anak tidak berdosa yang dikandung karena bisa berakibat jadi korban, namun demikian mestinya yang berzina sebagai yang berbuat dosa itu harus ada balasannya dan perbuatan dosa ini mestinya yang harus diantisipasi, inilah yang perlu di carikan solusinya dan menurut penulis yang paling efektif adalah pro aktifnya pihak Legislatif.

#### **Daftar Pustaka**

- A. Rasyid Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Direktorat Jenderal Pembinaan kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II* , Jakarta, 1985
- Manan Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Prenada Media. Jakarta, 2005.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. cet II. (Jakarta: PT. Rineka Cipta. 1994)
- Wahyu Widiani, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 2000)